



Evaluasi Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng

Arfah Yulianto

Universitas Negeri Makassar
Email: yuliantoarfah@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan fokus pada kriteria evaluasi kebijakan publik, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLRT efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantaeng selama periode 2017-2020. Program ini juga efisien dalam memberikan layanan dan merata dalam mendistribusikan manfaat kepada masyarakat. Namun, beberapa masalah, seperti kurangnya pemahaman anggota DPRD tentang program SLRT, ketidakpuasan fasilitator, dan prioritas anggaran perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan agar program SLRT lebih disosialisasikan kepada anggota DPRD, honor fasilitator ditingkatkan, evaluasi anggaran dilakukan, dan berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam program ini untuk meningkatkan efektivitas dan dukungan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci: Evaluasi, Kemiskinan, SLRT, Efektif, Efisien

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin menjadi salah satu agenda utama pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Prinsip utama dalam konsep kesejahteraan Indonesia adalah keadilan sosial. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan, serta memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang adil dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan juga melibatkan aspek-aspek perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan jaminan kerja. Tujuannya adalah memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi mereka yang membutuhkannya.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004:122). Menurut Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari (dalam paritas daya beli internasional), yang merupakan ukuran ekstrem kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah dalam upaya menanggulangi

kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk merealisasikan agenda ini, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini mencakup peningkatan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% dari masyarakat berpendapatan terendah. Beberapa di antaranya adalah Program Beras Bersubsidi bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah juga telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat miskin, memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (10,86%). Selain itu, individu yang berada di atas garis kemiskinan masih rentan jatuh miskin jika menghadapi guncangan atau krisis ekonomi.

Kesenjangan dalam distribusi pendapatan juga semakin melebar, sebagaimana tercermin dalam peningkatan Gini ratio Indonesia dari 0,35 pada tahun 2009 menjadi 0,40 pada September 2015. Kesulitan ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan pun masih tinggi, dengan proporsi penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai 14,11% pada Maret 2016, yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang hanya mencapai 7,79%. Banyak keluarga miskin dan rentan miskin mengalami kesulitan dalam menerima layanan perlindungan sosial yang lengkap, meskipun seharusnya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Masalah pelayanan sosial yang belum optimal berasal dari kurangnya integrasi dalam pendekatan penanganan masalah sosial. Penanganan masalah sosial yang masih berdasarkan pendekatan sektoral saat ini seringkali tidak memfokuskan pada sasaran yang tepat dan tidak dijalankan secara berkesinambungan. Banyak program pelayanan

sektoral yang beroperasi secara terpisah, mengikuti wilayah dan tugas pokok serta fungsi masing-masing lembaga atau institusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta oleh masyarakat, harus mempertimbangkan faktor integrasi. Selain itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga harus berfokus pada pencapaian sasaran yang jelas dan berkelanjutan, serta harus menjalani pendekatan yang lebih terpadu. Sederhananya, upaya penanganan masalah sosial harus lebih terkoordinasi, terarah, dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan miskin dapat menerima layanan perlindungan sosial yang sesuai dan terpadu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program penanggulangan kemiskinan sudah sejak lama diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Bantaeng, mulai dari Program Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat) Tahun 2013 sampai 2014. Tahun 2015 disempurnakan menjadi SELARAS tetapi realitasnya kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan hingga saat ini. Masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial dan tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Program Perlindungan Sosial tersebut dinilai sangat lamban menurunkan angka kemiskinan.

Maka pada tahun 2016 Program tersebut disempurnakan oleh Kementerian Sosial menjadi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) dan mulai diterapkan di kabupaten Bantaeng sejak Tahun 2017. Melalui program SLRT dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Layanan Pendidikan (Bidik Misi), Bantuan Listrik bersubsidi dan berbagai program lainnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantaeng.

SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya: Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan; Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial

lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif; Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam "pemutakhiran" Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah; Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Kabupaten Bantaeng telah meluncurkan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sejak tahun 2017 sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun program ini telah diimplementasikan, penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten ini masih menunjukkan progres yang lamban, seperti yang terlihat dalam data berikut:

- Tahun 2017: Tingkat kemiskinan sebesar 9,66%.
- Tahun 2018: Tingkat kemiskinan sebesar 9,23%.
- Tahun 2019: Tingkat kemiskinan sebesar 9,03%.
- Tahun 2020: Tingkat kemiskinan sebesar 8,95%.

Data ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantaeng selama periode 2017-2020 belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini memicu kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas Program SLRT dalam upaya mengurangi kemiskinan di wilayah ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) telah berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Evaluasi ini akan menggunakan kerangka teoritis yang diadaptasi dari teori William Dunn (Riant Nugroho, 2009:537) yang mengandung kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan (equity), Responsivitas, dan Ketepatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk mengevaluasi program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan (equity), Responsivitas, dan Ketepatan.

Evaluasi ini akan mencakup beberapa aspek penting, antara lain: Akses Masyarakat Terhadap Program Perlindungan Sosial. Menilai sejauh mana masyarakat

miskin dan rentan dapat dengan mudah mengakses program-program perlindungan sosial yang ditawarkan melalui SLRT. Integrasi Layanan Sosial. Mengkaji sejauh mana SLRT berhasil mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang tersedia, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kemiskinan. Identifikasi Keluhan. Mengevaluasi kemampuan SLRT dalam mendeteksi dan menangani keluhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kepesertaan dalam program perlindungan sosial maupun keluhan lainnya terkait dengan program-program tersebut. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat. Memeriksa bagaimana SLRT melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Pemahaman Masyarakat Tentang Program Perlindungan Sosial: Mengukur tingkat pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, tentang program perlindungan sosial yang mereka terima melalui SLRT.

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan efektivitas Program SLRT dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan program-program di masa depan guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih baik di wilayah ini.

Adapun yang termasuk dalam informan kunci yaitu Bupati Bantaeng, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, dan Pengurus SLRT.

Adapun informan pendukung adalah Mitra SLRT (BAZ Kabupaten Bantaeng), LSM dan Tokoh Masyarakat. Selain data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang didapat melalui kepustakaan yaitu data yang secara langsung berkaitan dengan penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan berdasarkan panduan wawancara yang telah disiapkan, sedangkan data sekunder adalah data kuantitatif atau kualitatif yang diperoleh dari dokumen terkait program SLRT. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, panduan observasi, dan catatan dokumen.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan mengacu pada model interaktif yang mencakup tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian berlangsung selama 3 bulan dari Januari hingga Maret 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan dimaksud adalah berkaitan dengan kinerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, yaitu seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. **Pengukuran menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn** yang terbagi dalam beberapa ulasan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas dapat dirumuskan sebagai tingkat pencapaian sasaran kegiatan atas target yang telah ditentukan. Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng sangat efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2017 s/d 2020

Tabel 1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2017	234,286	19,91	9,66
2018	260,263	17,20	9,23
2019	309,357	16,91	9,03
2020	340,890	16,84	8,95

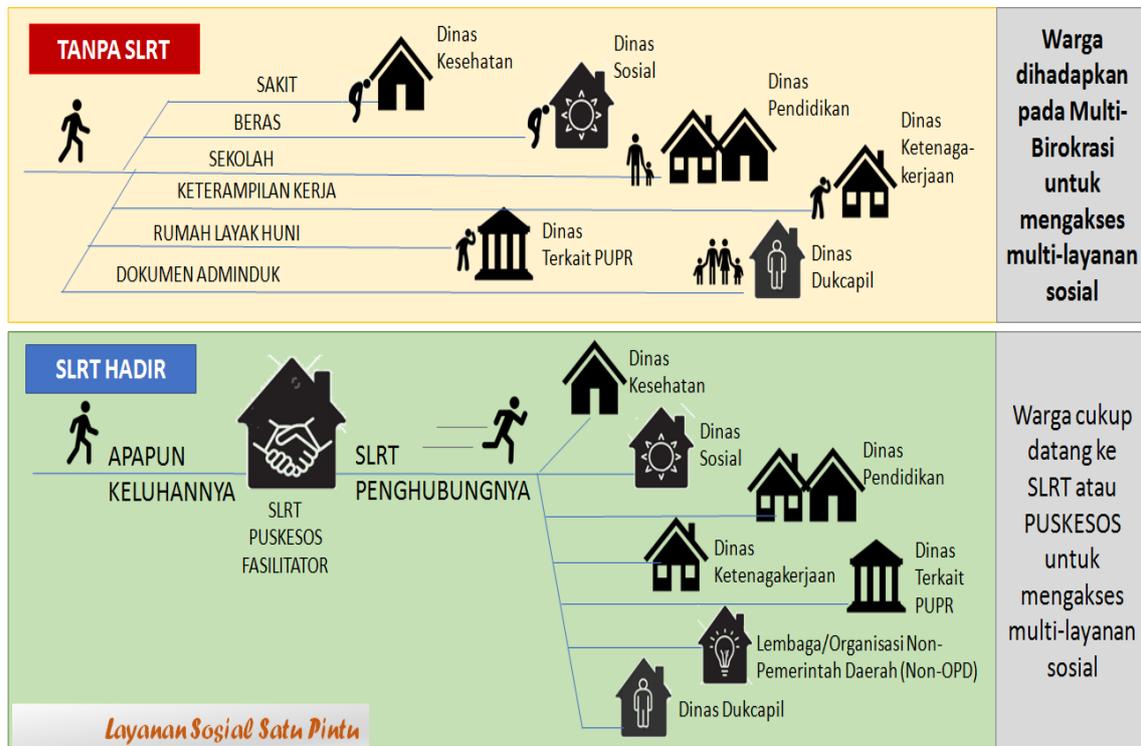
Sumber Data BPS Tahun 2021

Efektifitas program juga dapat dilihat dari menurunnya pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun. Dari rekap layanan pengaduan masyarakat 2 bulan terakhir yaitu Bulan Januari 2023 sebanyak 289 aduan dan di bulan Februari 2023 berada pada angka 190 aduan masyarakat. Aduan tersebut meliputi masalah kesehatan, bantuan biaya pendidikan, seragam sekolah, Program Indonesia pintar, layanan social dan lain sebagainya.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sangat Efisien dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bantaeng hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan SLRT masyarakat tidak perlu mendatangi beberapa kantor atau lembaga/instansi untuk memperoleh layanan atas masalah yang dihadapi tetapi cukup mendatangi sekretariat UPT Sipakatau sebagai jembatan bagi masyarakat dan instansi yang bersangkutan. Sehingga masyarakat tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mendatangi beberapa kantor atau stakeholder dimaksud. misalnya masyarakat membutuhkan layanan Jaminan kesehatan kartu BPJS, mereka cukup mendatangi sekretariat SLRT kemudian petugas SLRT yang akan meneruskan aduan tersebut ke pihak Dinas Kesehatan. Proses tersebut dapat dilihat perbedaan sebelum SLRT dan setelah SLRT.

Gambar 1 Perbedaan sebelum SLRT dan setelah SLRT



Sumber: Direktorat Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat direktorat jenderal pemberdayaan sosial kementerian sosial Republik Indonesia

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dialami masyarakat miskin dan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dari hasil wawancara dengan Wakil Bupati selaku Ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menunjukkan bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan hal tersebut salah satunya disebabkan karena SLRT memiliki data Based kemiskinan yang sangat akurat karena setiap 3 (tiga) bulan dilakukan perbaikan data melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.

4. Pemerataan

Manfaat program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sudah didistribusikan merata kepada seluruh masyarakat. Seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng sebanyak 67 Desa/Kelurahan telah merasakan manfaat dari program tersebut. Mulai dari layanan Kesehatan, bantuan benah rumah, penyelesaian studi, bantuan sembako, bantuan pengobatan, seragam sekolah dan lain-lain.

5. Responsivitas

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan perferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Kriteria responsivitas melihat kesesuaian antara Kebijakan SLRT dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tujuan dibentuknya SLRT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dan secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan; hal ini sangat sejalan dengan kebutuhan masyarakat miskin yang selama ini sulit mengakses layanan multi program dari pemerintah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa program SLRT sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan multi program baik dari pemerintah maupun swasta.

6. Ketepatan

Dari aspek ketepatan menunjukkan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna/bernilai dan apakah Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan, dari hasil penelitian menunjukkan hampir semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ini. Dari hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa hampir semua kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi oleh BAZ melalui SLRT.

Dalam wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengenal program SLRT, meskipun program ini memiliki arti penting tersendiri karena mencakup data warga miskin berdasarkan nama dan alamat, yang mungkin saja termasuk konstituen mereka. Di sisi lain, pihak fasilitator, baik dari tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan, mengeluhkan besarnya upah yang mereka terima, hanya 300 ribu rupiah per bulan, sementara mereka harus turun ke lapangan setiap tiga bulan untuk melakukan pembaruan data penduduk miskin. Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda), mereka mengatakan bahwa pagu anggaran mereka memang terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Evaluasi terhadap Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Bantaeng mengindikasikan bahwa program ini efektif dalam menurunkan angka

kemiskinan, efisien dalam memberikan layanan, dan telah merata dalam mendistribusikan manfaat kepada masyarakat. Namun, beberapa masalah yang muncul selama evaluasi perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Terdapat kurangnya pemahaman tentang program SLRT di kalangan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Hal ini adalah isu penting karena program ini mencakup data warga miskin by name by address yang mungkin merupakan konstituen mereka. Anggota DPRD seharusnya lebih menyadari dan terlibat aktif dalam program ini. Kemudian ketidakpuasan Fasilitator. Fasilitator, baik yang bekerja di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan, mendapatkan honor yang tidak seimbang dengan kinerja mereka yang harus melakukan pekerjaan lapangan setiap tiga bulan untuk melakukan pembaruan data penduduk miskin. Hal ini dapat mengganggu motivasi mereka dalam menjalankan tugas dan juga dapat berdampak negatif pada kualitas data. Selanjutnya prioritas Anggaran. Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) mengklaim bahwa pagu anggaran mereka terbatas, perlu evaluasi lebih lanjut tentang bagaimana anggaran dialokasikan. Program-program yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan, seperti SLRT, seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran.

Saran

- 1) Sosialisasi Program. Program SLRT perlu disosialisasikan lebih aktif kepada seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Bantaeng. Mereka harus memahami manfaat dan relevansi program ini, terutama dalam melayani konstituen mereka yang merupakan warga miskin.
- 2) Peningkatan Honor Fasilitator: Penting untuk meningkatkan honor fasilitator SLRT, terutama mengingat pentingnya pekerjaan mereka dalam menjaga data penduduk miskin yang akurat. Honor yang lebih baik akan meningkatkan motivasi dan kualitas pekerjaan mereka.
- 3) Evaluasi Prioritas Anggaran: Pemda perlu mengkaji ulang alokasi anggaran mereka untuk memastikan bahwa program-program yang membantu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas. Bukan hanya soal jumlah anggaran yang tersedia, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuan yang paling penting.
- 4) Pelibatan Berbagai Stakeholder: Untuk meningkatkan efektivitas dan dukungan lebih lanjut, penting melibatkan berbagai pihak yang relevan dalam pelaksanaan dan pengembangan program SLRT, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan sektor swasta. OMS dapat membantu dalam memonitor dan memberikan masukan independen terhadap program, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk dukungan finansial atau sumber daya lainnya. Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, program SLRT dapat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pelibatan stakeholder yang luas akan membantu meningkatkan transparansi,



akuntabilitas, dan keberlanjutan program ini, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan program SLRT dapat terus meningkatkan efektivitas dan dampaknya dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Bantaeng.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi selama proses penyelesaian disertasi ini. Terima kasih atas segala berkah, rahmat, dan hidayah dari Allah SWT yang telah mewujudkan penelitian ini.

Terima kasih kepada Prof. Hamsu Abdul Gani yang telah menjadi promotor saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Bimbingan, arahan, dan dukungan beliau sangat berarti dalam perjalanan penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Rifdan yang telah menjadi kopromotor dalam penelitian ini. Kontribusi beliau dalam memberikan pandangan dan saran sangat berharga. Terima kasih kepada Prof. Manan Sailan yang telah menjadi salah satu penguji internal disertasi ini. Masukan dan arahan beliau telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Saya berterima kasih kepada Prof. Muhammad Guntur yang telah menjadi penguji internal dalam penelitian ini. Kontribusi beliau sangat berarti dalam perbaikan disertasi ini. Terima kasih kepada Prof. Aslinda yang telah menjadi penguji internal disertasi ini. Saran dan masukan beliau sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini.

Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bantaeng, Dr. Ilham Azikin, dan Wakil Bupati Bantaeng, Drs. H. Sahabuddin, atas dukungan dan izin untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Bantaeng. Pengurus UPT Sipakatau Kabupaten Bantaeng, Pengurus BAZ Kabupaten Bantaeng, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng: Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penelitian. Kontribusi mereka sangat berarti dalam penelitian ini. Kepala BPS Kabupaten Bantaeng, Fasilitator SLRT Kabupaten Bantaeng: Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dr. Jalaluddin, M.Pd (Kepala sekretariat Bawaslu Propinsi Sul Sel), Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Bantaeng: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jalaluddin dan seluruh tim Bawaslu yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Orang Tua, Istri, dan Anak-anak: Tidak ada cukup kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta kepada orang tua saya, Istri saya Sri Yanti, SIP, dan anak-anak saya, Fadel Muhammad Aryan Al Kahfi, Muhammad Lutfih Al Muqtadir, Maqfirah Nurul Fadillah, dan Muhammad Firanda Al Faqih, yang telah memberikan dukungan, doa, dan kesabaran selama perjalanan penelitian ini.



REFERENSI

- Amirin, Tatang M. 2011. *Populasi dan Sampel Penelitian*.
Tatangmanguny.wordpress.com
- Bayo Ala, Andre, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta. Liberty.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- , 2010. *Metodologi penelitian Kuantitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Serta Ilmu Sosial Lainnya*, Jakart: Kencana Prenada Media Group
- Dunn, William., 1999. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada Universty Press.
- Gunawan Sumodiningrat. 2007. *Pemberdayaan Sosial*, Jakarta: Kompas
- Johannes Muller. 1980. *Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan manusia Dari Cengkeraman Kemelaratan*, Jakarta : Prisma
- Kartasamita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cides
- Made Suwandi. 2004. *Millenium Development Goals*, Jakarta: IIP
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindu, Kelompok Gramedia.
- Sadish, William R. et.al, 1991. *Foundations of Program Evaluations Theory of Practice*. London. Sage Publication.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed). 2005. *Metode Penelitaian Survey*, Jakarta: LP3S
- Stewart, Allen Mikcchell., 1994. *Empowering People*. London. Pustman Publishing.
- Sugiono, 1994, *Metode Penelitian Adminstrasi*, Bandung: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Suhendra, K, 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* Bandung: Alfabeta
- Supranto, J. 1987. *Statistik-Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Soetomo, 2010. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- , 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Tayibnapis, Farida Yusuf, 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Thoha, Mitha, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- World Bank. "What is the International Poverty Line?". Diakses dari <https://www.worldbank.org/>.



- BPS Kabupaten Bantaeng, 2021. Program Pendataan Layanan Sosial 2020 dan 2021, Kantor BPS Kabupaten Bantaeng
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2021. Strategi nasional Pemberdayaan Masyarakat (SNPK), Kantor Kemenkokesra
- Pengurus Pusat IKADIK, 2007. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Kampus IPDN Jatinangor.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2019/2020. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Kantor Kemenkokesra
- Christens, Brian D. 2012. *Targeting empowerment in community development: A community psychology approach to enhancing local power and well-being*. journals.permissions@oup.com.doi:10.1093/cdj/bss031(<http://cdj.oxfordjournals.org/> at University of Canberra on February 6, 2013)
- Hennink.Monique, Kiiti. Ndunge, Pillinger. Mara.& Jayakaran. Ravi, 2012. *Defining empowerment: perspectives from international development organizations*. Version of record first published: 28 Mar 2012 (<http://www.tandfonline.com/loi/cdip20> Downloaded by [University of Canberra] at 16:34 12 February 2013)
- Musliadi. 2012. *Pseudo Evaluation Model*. (<http://musliadiuhamka.blogspot.com/2012/04/pseudo-evaluation-model.html>)
- Muklir. 2012, *Evaluasi kebijakan Publik*, (<http://xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan-publik.html>)